

ANALISIS KUALITAS PEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 (Studi Penelitian di Kabupaten Bantul)

Oleh :
Suranto¹⁾

Countries all over the world which confess to be democratic ones should conduct election process to choose public representatives in their government system. There are many variances of the people's sovereignty manifestation, from liberal side to socialism side. Consequently, the form as well as the degree of people participation are various from purely active participation to mobilized participation. Political participation in many new democratic countries is inclined to limited on voting participation. The research aims to describe the voters quality of Bantul regency people in both 2009 Legislative Election and Presidency Election, since the degree of participation in Bantul Regency is the highest in Yogyakarta Special Province. The result shows that the participation is elevated in terms of procedural participation, but low in terms of substantial participation. Therefore, the research suggests some recommendation to improve the degree of voters' quality in future.

A. Pendahuluan

Dalam konteks sistem politik modern, tidak ada satu negara pun yang dapat disebut sebagai negara demokratis oleh masyarakat internasional jika tidak menyelenggarakan pemilu. Permasalahan apakah pemilihan umum tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan jujur, itu merupakan hal lain. Oleh sebab itu, hampir semua negara di dunia berusaha untuk mengidentifikasi diri sebagai negara yang demokratis pasca era Perang Dingin, dengan cara menyelenggarakan pemilu secara berkala. Meskipun realitasnya ada juga Pemilu yang dilakukan hanya untuk melegitimasi tindakan nyata rejim yang otokratik (*Chehabi & Linz 1998*).

Salah satu indikator kematangan demokrasi suatu bangsa adalah tingkat partisipasi politik warga negaranya. Partisipasi dalam tataran ideal mestinya pada keterlibatan dalam proses tranformasi aspirasi kepentingan publik ke dalam ranah struktur politik. Pada Negara berkembang (Eropa Barat dan AS), konsep partisipasi politik akan sangat ideal mengingat usia implementasi demokrasi yang sudah ratusan tahun. Namun berbeda halnya dengan negara-negara baru seperti halnya Indonesia yang belum lama mengenal demokrasi. Konsekuensinya, konsep partisipasi politik masih banyak dimaknai secara pendek sebagai keikutsertaan warga dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu berlangsung. Dengan demikian diskur-

1. Dr. Suranto, M.Pol. adalah Staf Pengajar Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. dan Anggota KPU Kabupaten Bantul

sus kualitas partisipasi politik di Indonesia masih berkuat pada aspek tinggi-rendahnya kehadiran pemilih di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pemilu di Indonesia telah diadakan sebanyak 10 kali, dan yang terakhir diselenggarakan pada 2009 dalam bentuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Penyelenggaraan Pemilu berjalan aman dan lancar. Kabupaten Bantul yang merupakan kabupaten terbesar kedua penduduknya di DIY telah sukses menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Fakta menunjukkan bahwa tingkat partisipasi warga mencapai rerata tertinggi di wilayah DIY. Oleh sebab itu menjadi sangat menarik untuk memaparkan potret kualitas pemilih di wilayah ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perilaku pemilih pada pemilu 2009 di Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualitas pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kualitas pemilih di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran kualitas pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Bantul

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kualitas pemilih di Kabupaten Bantul serta alternatif solusinya.

D. Kerangka Teoretik

1. Pemilihan Umum

Pemilu berdasarkan UU No. 10/2008 didefinisikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Samego (2007) menyatakan bahwa Pemilu dapat disebut juga sebagai *Political Market*, yang berarti tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik.

Sementara itu PBB, IFES dan IDEA Internasional mengklasifikasikan adanya tiga tipe dasar sistem pemilu yaitu:

- a). Sistem Mayoritas/Pluralitas (Majoritarian/Plurality); Dalam system ini, untuk dapat terpilih dalam suatu daerah pemilihan (distrik), seorang kandidat atau beberapa orang kandidat harus memenangkan jumlah tertinggi dari suara yang sah, atau dalam beberapa varian, mayoritas dari suara yang sah dalam distrik tersebut.
- b). Sistem Representasi Proporsional (RP); Dalam system ini, jumlah

wakil yang terpilih untuk suatu distrik ditentukan oleh persentase suara sah yang diraih oleh partai atau kandidat peserta pemilu dalam distrik tersebut.

- c). Sistem Semi-Proporsional; Dalam sistem ini, partai politik yang tidak mendapat dukungan suara terbanyak masih dapat memperoleh perwakilan. Namun sistem ini tidak dirancang untuk memberikan alokasi perwakilan sesuai dengan prosentase suara yang diperoleh partai politik seperti sistem RP.

2. Perilaku Memilih (*Political Behavior*)

Menurut Afan Gaffar (2004) selama ini penjelasan-penjelasan teoritis tentang *voting behavior* didasarkan pada tiga model/pendekatan yaitu model/ pendekatan sosiologis, model/ pendekatan psikologis dan model/ pendekatan politik rasional.

Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrumen kemasyarakatan seseorang seperti, (i) status sosioekonomi (seperti pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas), (ii) agama, (iii) etnik, bahkan (iv) wilayah tempat tinggal. Penelitian mengenai perilaku ini dicetuskan ilmuwan politik dari *University of Columbia* yang mengkaji perilaku pemilih pada waktu pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) tahun 1940. Mereka mendapatkan pola bahwa dari segi kelas, kelas bawah dan kelas menengah di AS berkecenderungan mendukung Partai Demokrat, sementara kelas atas menyokong Partai

Republik (*Lipset 1960:305*). Demikian pula halnya jika dilihat dari aspek agama, penganut agama Kristen Protestan di AS cenderung memilih Partai Republik dibandingkan dengan mereka yang memeluk agama Katolik (*Lazarsfeld 1968:21-22*).

Pendekatan kedua disebut dengan pendekatan psikologis, yang dikembangkan oleh *Campbell et. al. (1960)*, *Jaros & Grant (1974)*, *Rose & McAllister (1990)* dari *Michigan University*. Pendekatan ini menerangkan bahwa perilaku pemilih sangat bergantung pada sosialisasi politik lingkungan yang menyelimuti diri pemilih.

Pendekatan ketiga, pendekatan pilihan rasional yang dipopulerkan oleh *Downs (1957)* yang mengasumsikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara (TPS), tanpa mempertimbangkan agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan macam sebagainya. Dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai atau calon presiden yang tengah berkompetisi, ia tidak akan melakukan pilihan pada pemilu (*Downs 1957:261*). Hal ini dilandaskan pada kalkulasi ekonomi, di mana perhitungan biaya yang dikeluarkan lebih besar dengan apa yang akan didapatnya kelak. Maka jalan terbaik bagi pemilih adalah melakukan kegiatan atau aktivitas kesehariannya (*Pappi 1996*).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mengoptimalkan penggunaan data sekunder yang telah tersedia baik dalam bentuk laporan, monograf maupun data statistik.

2. Teknik pengumpulan data:

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara dan observasi lapangan.

3. Teknik Analisis data:

Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis data sekunder, dengan metode triangulasi.

F. Hasil Penelitian

1. Potret Kualitas Pemilih pada Pileg dan Pilpres 2009 di Kabupaten Bantul

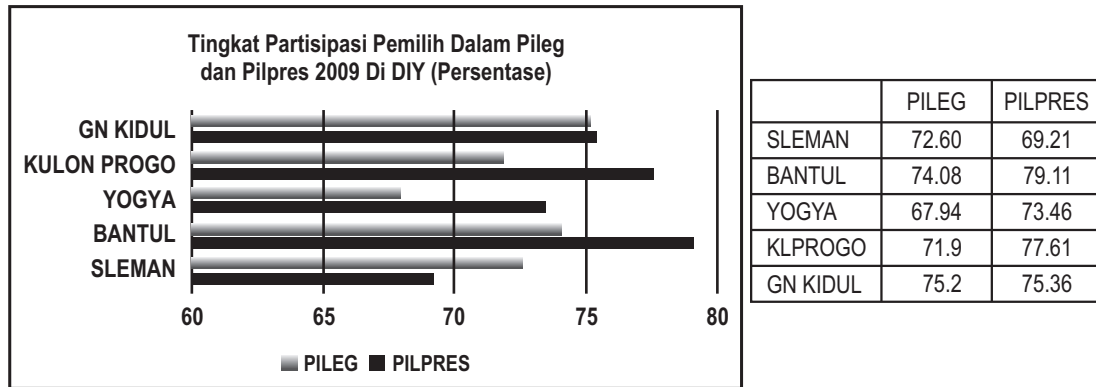
Pada hakekatnya untuk mengukur kualitas pemilih dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek prosedural dan aspek substansial. Ditinjau dari aspek prosedural, kualitas pemilih diindikasikan dari tingkat partisipasi dalam Pemilu di TPS serta tingkat kebenaran dalam melakukan penandaan pada surat suara. Sedangkan ditinjau dari aspek substansial, kualitas pemilih diindikasikan dari tingkat kesadaran pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan rasional bukan karena mobilsasi.

Pemilu 2009 di Kabupaten Bantul dilihat dari aspek prosedural sudah sangat berhasil. Dibandingkan dengan 3 kabupaten dan 1 kota di wilayah DIY, Bantul selalu menempati ranking atas bahkan sejak Pemilu 2004. Hasil pemilu legislatif 2009 menunjukkan bahwa Bantul menduduki peringkat kedua dalam hal tingkat partisipasi politik (74,08%) di bawah Kab Gunungkidul (75,20%). Sedangkan pada hasil Pemilu Presiden 2009, Bantul menduduki peringkat pertama dengan angka partisipasi sebesar 79,11%. Komparasi selengkapnya ini dapat dilihat pada gambar 1.

Hasil ini menunjukkan bahwa dilihat dari tingkat kehadiran pemilih di TPS, kualitas pemilih di Bantul sudah sangat memuaskan. Peningkatan partisipasi terjadi secara signifikan dari Pileg ke Pilpres di Bantul sebesar 5,03%.

Peningkatan signifikan ini dapat terjadi karena adanya minimal 3 faktor, yaitu: faktor fasilitasi pemutakhiran data pemilih Pilpres yang melibatkan RT dan Dukuh guna mengupdate data pemilih yang dilakukan PPDP, faktor peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilih serta faktor putusan Mahkamah Agung yang membolehkan penggunaan KTP sebagai tanda untuk mendaftar sebagai pemilih.

Sementara itu, rincian tingkat partisipasi politik berdasarkan kecamatan menunjukkan keberagaman (lihat tabel 1).



Gambar 1

Tabel 1
TINGKAT PARTISIPASI PILEG DAN PILPRES 2009
DI KABUPATEN BANTUL

NO	KECAMATAN	PILEG	PILPRES
1	PLERET	75.06%	81.91%
2	PAJANGAN	80.14%	81.81%
3	PIYUNGAN	76.83%	81.28%
4	BANTUL	72.60%	81.21%
5	SEWON	78.11%	81.07%
6	KASIHAN	73.01%	79.89%
7	DLINGO	78.25%	79.59%
8	BGN TAPAN	73.12%	79.00%
9	IMOGIRI	74.77%	78.66%
10	JETIS	73.99%	78.61%
11	PANDAK	70.60%	77.87%
12	SRANDAKAN	76.10%	77.08%
13	KRETEK	71.52%	76.22%
14	SEDAYU	73.79%	75.90%
15	BAMBANG LIPURO	68.12%	75.40%
16	PUNDONG	72.41%	75.09%
17	SANDEN	71.01%	74.24%
	RERATA KAB BANTUL	74.08%	78.52%

Sumber: KPU Bantul (2009)

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi meningkat dari Pileg ke Pilpres di semua kecamatan. Mengingat partisipasi pada Pilpres yang lebih tinggi, maka data ini dijadikan rujukan untuk menganalisis hasil per kecamatan.

Data partisipasi rata-rata adalah sebesar 78,52%, dengan partisipasi tertinggi di Kecamatan Pleret dan terendah di Kecamatan Sanden. Untuk menganalisis data ini digunakan pendekatan sosiologis, dengan melakukan klasifikasi wilayah menjadi 3 yaitu wilayah suburban, wilayah pedalaman (agraris) dan wilayah pesisir. Adapun karakteristik dan pembagian wilayahnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan klasifikasi tersebut tersebut terlihat bahwa wilayah kecamatan yang termasuk kategori suburban, tingkat partisipasinya cukup tinggi (peringkat 4,5,6 dan 8). Hal ini dapat terjadi karena karakteristik penduduknya yang berpendidikan cukup tinggi, akses informasi yang baik, interaksi dengan masyarakat kota yang intens.

Sedangkan untuk wilayah pesisir, menunjukkan fakta bahwa tingkat partisipasi masyarakat cenderung rendah (peringkat 12,13 dan 17). Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa karakteristik penduduk pesisir yang keras, terbuka dan apatis, selalu mempertimbangkan aspek ekonomis dalam kaitannya dengan alokasi waktu.

Tabel 2
KLASIFIKASI PENDUDUK
BERDASARKAN KONDISI SOSIO-GEOGRAFIS

No	KATEGORI	KARAKTERISTIK	KECAMATAN
1	Wilayah Suburban	<ul style="list-style-type: none"> - Heterogenitas penduduk tinggi - Tingkat pendidikan cukup tinggi - Mobilitas dan Interaksi dengan penduduk kota - Akses informasi tinggi - Budaya <i>patron client</i> kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasihan - Sewon - Banguntapan - Piyungan
2	Wilayah Pedalaman (Agraris)	<ul style="list-style-type: none"> - Penduduk relatif homogen - Tingkat pendidikan relatif rendah - Mobilitas dan interaksi dengan masyarakat lain rendah - Akses informasi kurang - Budaya <i>patron-client</i> tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pajangan - Sedayu - Pandak - Pundong - Bambanglipura - Jetis - Imogirio - Dlingo - Bantul - Pleret
3	Wilayah Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - Heterogenitas penduduk cukup tinggi - Tingkat pendidikan rendah - Mobilitas dan interaksi dengan masyarakat cukup tinggi - Budaya <i>patron client</i> rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kretek - Sanden - Srandakan

Dengan demikian, bisa dipastikan proses sosialisasi bagi warga pesisir sulit dilakukan secara efektif, karena kendala alokasi waktu dan sikap tersebut. Potret warga pesisir yang juga ditopang oleh posisinya sebagai obyek wisata (Kretek dan Sanden) menunjukkan hasil yang lebih mengecewakan. Komposisi penduduk yang heterogen dengan mengutamakan kepentingan ekonomi telah menyebabkan sikap acuh mereka pada pelaksanaan Pemilu.

Sementara itu, untuk wilayah pedalaman (agraris) menunjukkan fakta tingkat partisipasi yang beragam. Ada kecamatan yang menempati posisi tertinggi (Pleret, Pajangan), namun ada juga kecamatan yang tingkat partisipasinya rendah (Pundong, Bambanglipura). Fenomena ini dapat dijelaskan melalui karakteristiknya. Penduduk wilayah pedalaman yang bersifat relatif homogen cenderung masih tunduk pada otoritas formal maupun non formal. Pola hubungan *patron-client* masih sangat mewarnai dinamika penduduknya. Dengan demikian tingkat partisipasi penduduk sangat tergantung pada kemampuan, komitmen dan sikap dari para tokoh (*patron*) yang berpengaruh terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Kasus melejitnya Pleret sebagai wilayah dengan tingkat partisipasi tertinggi tentunya tak lepas dari banyaknya tokoh-tokoh berpengaruh di wilayah tersebut baik formal maupun non formal yang menjadi panutan warganya. Demikian pula halnya dengan wilayah kecamatan Pajangan.

Selanjutnya untuk melihat kualitas pemilih secara prosedural berikutnya adalah dengan menganalisis tingkat

kesalahan pemilih dalam melakukan penandaan.

Apabila dibandingkan dengan wilayah lain di tingkat kesalahan penandaan surat suara menduduki posisi ketiga di bawah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman (lihat tabel 3). Hal ini sangat wajar mengingat tingkat pendidikan rata-rata masyarakat pada kedua wilayah tersebut lebih baik. Faktor penentu lain adalah efektivitas sosialisasi pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu di masing-masing wilayah. Kondisi demografis dan geografis yang sulit turut pula menentukan efektivitas sosialisasi dilakukan.

Tabel 3
TINGKAT KESALAHAN DALAM PENANDAAN
SURAT SUARA PADA PILPRES 2009 DI DIY

NO	KAB/KOTA	PERSENTASE
1	KOTA YOGYAKARTA	4,52%
2	KAB BANTUL	6,98%
3	KAB KULONPROGO	7,13%
4	KAB GUNUNGKIDUL	7,80%
5	KAB SLEMAN	5,61%

Sumber: Hasil Rekap Pilpres di KPU DIY (2009)

Selanjutnya apabila dilakukan komparasi antara kesalahan pendanaan dalam Pileg di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa tingkat kesalahan terendah terjadi pada penandaan Surat Suara DPD yaitu sebesar 10,68%. (selengkapnya lihat tabel 4). Hal ini bisa terjadi karena desain surat suara yang lebih sederhana dibandingkan tiga surat suara lainnya. Sedangkan tingkat kesalahan tertinggi terjadi pada penandaan surat suara DPRD Propinsi. Hal ini tak lepas dari besarnya desain surat suara serta kecilnya kolom yang harus ditandai pemilih.

Tabel 4
TINGKAT KESALAHAN DALAM PENANDAAN SURAT SUARA PADA PILPRES 2009 DI KAB BANTUL

NO	JENIS SURAT SUARA	PERSENTASE
1	DPR RI	12,71%
2	DPD	10,68%
3	DPRD Propinsi	13,03%
4	DPRD Kabupaten	10,87%

Sumber: KPU Kabupaten Bantul (2009)

Kemudian apabila dilihat dari tingkat persebaran berdasar geografis per kecamatan, kesalahan penandaan rata-rata kabupaten adalah sebesar 8,87% untuk dua kali Pemilu 2009. Adapun data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa klasifikasi berdasarkan geografis sebagaimana dijadikan alat analisis pada tingkat partisipasi masih relevan digunakan, khususnya terkait dengan aspek pendidikan. Namun dalam konteks kesalahan penandaan, ada tambahan satu faktor penting yang menentukan, yaitu kualitas sosialisasi pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dan desa.

Apabila dilihat dari kategori sosio-geografis, masyarakat *suburban* (Banguntapan (4), Sewon (8), Piyungan (2) dan Kasihan (3)) menunjukkan tingkat kesalahan yang rendah dalam penandaan. Hal ini sangat mungkin

Tabel 5
TINGKAT KESALAHAN PENANDAAN SURAT SUARA DI KABUPATEN BANTUL

NO	KECAMATAN	PILEG	PILPRES	RERATA
1	JETIS	6.53%	3.17%	4.85%
2	PIYUNGAN	5.20%	7.91%	6.55%
3	KASIHAN	6.45%	7.56%	7.00%
4	BANGUNTAPAN	5.48%	9.05%	7.27%
5	PANDAK	8.19%	7.20%	7.69%
6	PLERET	6.80%	8.81%	7.81%
7	SEDAYU	6.53%	9.25%	7.89%
8	SEWON	6.18%	10.50%	8.34%
9	DLINGO	7.58%	10.37%	8.98%
10	BAMBANGLIPURA	7.44%	11.15%	9.30%
11	PAJANGAN	7.70%	12.01%	9.86%
12	SANDEN	7.47%	12.61%	10.04%
13	PUNDONG	8.64%	12.14%	10.39%
14	IMOGIRI	9.84%	11.34%	10.59%
15	KRETEK	7.76%	13.75%	10.75%
16	BANTUL	6.95%	16.48%	11.71%
17	SRANDAKAN	7.78%	15.68%	11.73%
	RERATA KAB.BANTUL	7.21%	10.53%	8.87%

Sumber: KPU Kabupaten Bantul (2009)

terjadi karena relatif tingginya tingkat pendidikan warga wilayah suburban. Di samping itu tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu cukup baik, di samping didukung oleh akses informasi media massa yang intensif.

Sementara pada masyarakat pesisir, tingkat kesalahan menunjukkan kondisi yang cukup tinggi (Sanden (12), Kretek (15) dan Srandakan (17)). Realitas ini dapat terjadi karena tingkat pendidikan warga yang rendah, serta sikap acuh masyarakat pesisir yang lebih mengutamakan aspek ekonomis, sehingga proses sosialisasi di wilayah pesisir yang dilakukan penyelenggara pemilu terkendala karena sulit mengumpulkan warga. Kesulitan ini diperparah dengan banyaknya warga pendatang (nelayan, dan pelaku wisata) yang memiliki *stereotype* yang sama yang tinggal di wilayah ini.

Sedangkan fakta dari wilayah agraris (pedalaman) menunjukkan tingkat kesalahan penandaan yang beragam. Wilayah Jetis, Pandak dan Pleret menunjukkan tingkat kesalahan yang rendah, sementara di wilayah Pundong, Imogiri dan Bantul menunjukkan tingkat kesalahan yang tinggi. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui kinerja penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi serta kinerja pemimpin formal dan informal di wilayah tersebut yang notabene masih sangat diwarnai pola hubungan *patron-client* yang kental.

Berdasarkan aspek prosedural sebagaimana diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa kualitas pemilih di Kabupaten Bantul sudah memadai dan cukup baik.

Namun berbeda halnya ketika dilihat dari aspek substansial, kualitas pemilih masih memprihatinkan. Sebagaimana kondisi pemilih di wilayah lain, kuantitas pemilih rasional di Bantul masih belum menggembirakan. Memang sulit memperoleh data kuantitatif secara pasti, namun secara kualitatif dapat diindikasikan dari beberapa kasus berikut:

- a. Terungkapnya kasus *money politics* pada Pemilu legislatif 2009 yang sempat dilimpahkan ke Pengadilan menunjukkan bahwa Pemilih masih banyak yang bersifat pragmatis untuk mengalihkan hak politiknya sebagai komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan.
- b. Fakta perolehan suara parpol yang tinggi dan bahkan banyak yang melebihi dari perolehan suara caleg secara perorangan, menunjukkan bawa pemilih dalam menentukan pilihannya masih bersifat emosional dan tidak mempertimbangkan program yang ditawarkan caleg perorangan. Mereka pada umumnya pemilih tradisional yang menentukan pilihan berdasarkan ideology yang telah lama dianutnya.
- c. Fakta banyaknya pemilih sepuh yang kesulitan menentukan pilihannya berdasarkan hati nurani, sehingga mudah dimobilisasi.

2. Faktor Determinan Kualitas Pemilih

Berdasarkan paparan di atas serta hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat yang dilakukan dapat diidentifikasi adanya beberapa faktor

determinan kualitas pemilih dalam pemilu 2009 di Kabupaten Bantul, yaitu:

- a. Faktor tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan pemilih akan mendorong semakin tinggi tingkat partisipasi serta rendahnya kesalahan dalam penandaan surat suara.
- b. Faktor akses informasi. Akses informasi yang mudah dan intensif menyebabkan rendahnya kesalahan dalam penandaan serta tingginya partisipasi pemilu.
- c. Faktor kepemimpinan dan komitmen pemimpin formal dan informal di wilayah kecamatan. Pola hubungan *patron-client* yang kental di wilayah agraris membutuhkan komitmen dan kuatnya kepemimpinan formal dan informal di wilayah lokal.
- d. Faktor efektivitas sosialisasi oleh penyelenggara pemilu dan pihak lain terkait.
- e. Faktor mobilitas horizontal dan interaksi sosial masyarakat dengan masyarakat lain yang lebih maju..

3. Alternatif Pemecahan:

Dari beberapa temuan tersebut, implikasinya adalah perlu dilakukan serangkaian strategi untuk meningkatkan kualitas pemilih, yaitu:

- a. Strategi sosialisasi pemilu yang spesifik untuk masing-masing warga dengan karakter wilayah yang berbeda, khususnya wilayah pesisir mesti menjadi fokus utama.
- b. Strategi peningkatan kapasitas dan komitmen pemimpin formal dan informal di wilayah pedalaman (agraris).

- c. Strategi peningkatan akses informasi bagi warga di wilayah pedalaman dan wilayah pesisir.

G. Penutup

Kualitas pemilih di Kabupaten Bantul dilihat dari aspek prosedural menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun secara substansial, kualitas pemilih rasional yang ideal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana juga dialami daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan sinergitas program pendidikan pemilih baik yang akan dilakukan oleh Pemerintah daerah, KPU, Partai politik, Perguruan Tinggi, Ormas dan LSM.

- Campbell, A. et al. (1960) *The American Voter*. New York: John Wiley
- Chehabi, H. E. & Linz, Juan L. (1998). *Sultanistic Regimes*. Baltimore and London: The John Hopkins University
- Downs. (1957). *An economic theory of democracy*. New York: Harper and Row.
- Gaffar, Afan. (2004) *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Jaros, D.; Grant, L. (1974). *Political Behavior: Choices and Perspectives*. New York, St Martin's Press.
- KPU Kabupaten Bantul (2009), *Laporan Pokja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Kabupaten Bantul*.
- KPU Kabupaten Bantul (2009), *Laporan Pokja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Bantul*.
- Lazarsfeld, Paul (1968). *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*. Columbia University Press; 3rd edition.
- Lipset, S. M. (1990). *Continental divide: The values and institutions of the United States and Canada*. New York: Routledge Press.
- Pappi, 1996 Pappi, F.U., 1996. *Political Behavior: Reasoning Voters and Multi-party Systems*
- Rose, Richard and Ian McAllister. 1990. *The Loyalties of Voters: A Lifetime Learning Model*. London and Beverly Hills, California: Sage Publications